

**LAPORAN PELAKSANAAN
PENERAPAN TATA KELOLA (GCG)
PT BPR TATA KARYA INDONESIA
TAHUN 2023**



**PT. Bank Perekonomian Rakyat
TATA KARYA INDONESIA**

**JL. JEMBATAN III RUKO 35 A-B
TELEPON: 021 6622017**

BAB I

PENJELASAN UMUM

Tata kelola perusahaan yang efektif membentuk dasar kokoh dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan bisnis serta persaingan yang semakin intensif. Dengan demikian, kepercayaan dari seluruh nasabah dan pemangku kepentingan dapat terjaga dan berkembang. BPR Tata Karya Indonesia dengan tekun berupaya mengelola setiap risiko melalui sistem pengawasan dan pengendalian internal yang efektif, sebagai bagian integral dari implementasi dan penerapan tata kelola.

BPR Tata Karya Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjalankan tata kelola sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan), yakin bahwa tata kelola perusahaan yang baik menjadi pondasi yang kuat bagi pertumbuhan bank yang sehat dan berkesinambungan. Ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan seluruh nasabahnya.

Sebagai lembaga intermediasi, BPR Tata Karya Indonesia memastikan bahwa seluruh lapisan dalam perusahaan dapat mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola dengan akurat, melibatkan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan. Hal ini diperkuat oleh komitmen bank untuk mencapai visinya sebagai penyedia layanan perbankan yang terpercaya, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, serta menciptakan nilai tambah bagi para nasabah.

Dalam menerapkan tata kelola, BPR TKI konsisten mengacu pada tiga aspek utama tata kelola, yakni struktur, proses, dan hasil tata kelola. Ketiga aspek tersebut menjadi inti dan fokus utama bank dalam mewujudkan tata kelola yang bertujuan melindungi kepentingan pemangku kepentingan.

Sejalan dengan perjalanan tahun 2023 dan masa depannya, BPR Tata Karya Indonesia terus berupaya mewujudkan komitmen tersebut melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA BPR

A. Pengungkapan Penerapan Tata Kelola

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi		
1.	Nama	:	Herty Djaelani
	NIK	:	3172025409600004
	Jabatan	:	Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Direktur: a. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku b. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank c. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas Lainnya. e. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. f. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai.		
2.	Nama	:	Lidianty Simbolon
	NIK	:	3273205909810002
	Jabatan	:	Direktur yang menjalankan fungsi kepatuhan
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	Direktur Operasional: a. memimpin dan bertanggung jawab menjalankan perusahaan b. menentukan, merumuskan, dan memutuskan sebuah kebijakan dalam operasional perusahaan c. menyusun dan menetapkan berbagai strategi strategis untuk mencapai visi dan misi perusahaan d. mengkoordinasikan dan mengawasi semua kegiatan operasional di perusahaan e. mengangkat dan memberhentikan karyawan perusahaan f. menjadi perwakilan perusahaan yang berhubungan dengan pihak eksternal perusahaan Direktur YMF Kepatuhan a. menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian termasuk memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain b. memantau dan menjaga agar kegiatan usaha BPR tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan c. memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lain d. memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan e. melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR f. melapor kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direksi BPR.		
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris :			
a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko pada setiap kegiatan operasional dan bisnis. b. Tingkat Kesehatan Bank selalu diupayakan dalam posisi sehat.			

c. Monitor kepada debitur yang sudah dilaksanakan.
d. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti di tahun 2023.
e. Semua temuan Audit Internal telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan internal kontrol dalam melaksanakan tugas masing-masing.
Penjelasan Lebih Lanjut :
Nihil

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

No.	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris		
1.	Nama	:	Feryanto Njomin
	NIK	:	3172012202790010
	Jabatan	:	Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.		
2.	Nama	:	Hendra Nugraha
	NIK	:	3174091008740011
	Jabatan	:	Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab :		
	a. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi b. Memastikan penerapan Tata Kelola dalam seluruh kegiatan usaha dan operasional bank c. Memberikan saran atau advis kepada kepada Direksi berkaitan dengan isu- isu strategis dan proses pekerjaan d. Memastikan Direksi telah menindaklanjuti seluruh temuan audt dan rekomendasi dari Audit Intern, Audit Ekstern dan hasil pemeriksaan pengawas Otoritas Jasa Keuangan dan Instansi lainnya.		
Rekomendasi Kepada Direksi :			
a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis. b. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank selalu dalam posisi sehat. c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu : Memberikan mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, Mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku dan memberikan reward / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi BPR Tata Karya Indonesia. d. Memonitor secara ketat kepada debitur agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasi secara cepat. e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2022. f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah-langkah perbaikan kontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.			
Penjelasan Lebih Lanjut :			
Nihil			

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No.	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1.	Komite Audit

	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
2.	Komite Pemantau Risiko
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	Tidak ada
Tindak Lanjut Rekomendasi Tugas dan Tanggung Jawab Komite	
tidak memiliki komite	

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

No.	Nama	NIK	Keahlian	Jabatan di Komite	Pihak Independen
1.					
2.					
3.					
Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite			:	NIHIL	

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No.	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite		
1.	Komite Audit		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
2.	Komite Pemantau Risiko		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
3.	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Program	:	-
	Realisasi	:	-
	Jumlah Rapat	:	-
Penjelasan Lebih Lanjut			
NIHIL			

B. Kepemilikan Saham Direksi

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Herty Djaelani	3172025409600004	Rp0	0%
2.	Lidianty Simbolon	3273205909810002	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Anggota Direksi tidak memiliki kepemilikan Saham.				

2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No.	Nama Direksi	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Herty Djaelani	3172025409600004	-	-	0%
2.	Lidianty Simbolon	3273205909810002	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Direksi tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain.					

C. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Direksi dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Herty Djaelani	3172025409600004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Lidianty Simbolon	3273205909810002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan pada anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham.					

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No.	Nama Direksi	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1.	Herty Djaelani	3172025409600004	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Lidianty Simbolon	3273205909810002	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
tidak terdapat hubungan keluarga dengan anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham.					

D. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Feryanto Njomin	3172012202790010	Rp5.600.000.000	40%
2.	Hendra Nugraha	3174091008740011	Rp0	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :				
Komisaris Utama merupakan salah satu pemegang saham dengan jumlah saham yang dimiliki sebesar 40% atau setara dengan Rp 5.600.000.000,00 (lima milyar enam ratus juta rupiah).				

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1.	Feryanto Njomin	3172012202790010	-	-	0%
2.	Hendra Nugraha	3174091008740011	-	-	0%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham pada perusahaan lain.					

E. Hubungan Keuangan dan/atau Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Dewan Komisaris Lain, Anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Feryanto Njomin	3172012202790010	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Hendra Nugraha	3174091008740011	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Tidak terdapat hubungan keuangan anggota Dewan Komisaris pada BPR					

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris Lain	Pemegang Saham
1.	Feryanto Njomin	3172012202790010	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2.	Hendra Nugraha	3174091008740011	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Komisaris Utama yang juga merupakan pemegang saham memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham lainnya.					

F. Paket/ Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

1. Paket/ Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Remunerasi (Dalam 1 Tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1.	Gaji	2	Rp500.000.000	2	Rp226.800.000
2.	Tunjangan	0	Rp0	0	Rp0
3.	Tantiem	0	Rp0	0	Rp0
4.	Kompensasi Berbasis Saham	0	Rp0	0	Rp0
5.	Remunerasi Lainnya	0	Rp0	0	Rp0
Total			Rp500.000.000		Rp226.800.000
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Direksi dan Dewan Komisaris hanya memiliki remunerasi berupa gaji.					

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No.	Jenis Fasilitas Lain (Dalam 1 Tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1.	Perumahan	Tidak ada	Tidak ada
2.	Transportasi	Tidak ada	Tidak ada
3.	Asuransi Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada
4.	Fasilitas Lainnya	Tidak ada	Tidak ada
Penjelasan Lebih Lanjut :			
tidak ada			

G. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

Keterangan	Perbandingan
	(a/b) : 1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2 : 1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1.1 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	3 : 1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	3 : 1
Penjelasan Lebih Lanjut :	
Gaji keseluruhan telah mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 tahun.	

H. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

1. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

No.	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1.	28 Maret 2023	2	1. Rencana Bisnis BPR TW I 2. Isu strategis BPR 3. Evaluasi kebijakan strategis dan/atau evaluasi Rencana Bisnis BPR 4. Langkah-langkah yang diperlukan oleh Direksi untuk mengatasi permasalahan yang ada
2.	26 Juni 2023	2	1. Rencana Bisnis BPR TW II 2. Isu strategis BPR 3. Evaluasi kebijakan strategis dan/atau evaluasi Rencana Bisnis BPR 4. Langkah-langkah yang diperlukan oleh Direksi untuk mengatasi permasalahan yang ada
3.	18 September 2023	2	1. Rencana Bisnis BPR TW III 2. Isu strategis BPR 3. Evaluasi kebijakan strategis dan/atau evaluasi Rencana Bisnis BPR 4. Langkah-langkah yang diperlukan oleh Direksi untuk mengatasi permasalahan yang ada
4.	08 Desember 2023	2	1. Rencana Bisnis BPR TW IV & Penetapan RBB BPR 2024 2. Isu strategis BPR 3. Evaluasi kebijakan strategis dan/atau evaluasi Rencana Bisnis BPR 4. Langkah-langkah yang diperlukan oleh Direksi untuk mengatasi permasalahan yang ada
Penjelasan Lebih Lanjut Pelaksanaan Rapat dalam 1 tahun :			
sampai dengan bulan Desember 2023, BPR telah melaksanakan 4 kali rapat minimal 1 kali dalam 3 bulan. dengan agenda pembahasan tersebut di atas.			

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No.	Nama Dewan Komisaris	NIK	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1.	Feryanto Njomin	3172012202790010	4	0	100%
2.	Hendra Nugraha	3174091008740011	4	0	100%
Penjelasan Lebih Lanjut :					
Dewan Komisaris telah menghadiri rapat sebanyak 4 kali dalam setahun.					

No.	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan	NIK			
1.									
2.									
3.									
Penjelasan Lebih Lanjut :									
NIHIL									

L. Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

No.	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/ Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah (Rp)
1.	22 September 2023	Sosial	Memberikan bantuan dalam bentuk sembako dan uang tunai	Panti Asuhan Kasih ABBA	Rp1.500.000
Penjelasan Lebih Lanjut Pemberian Dana Untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik					
Pemberian dana untuk kegiatan sosial yang kami adakan pada tahun 2023 yaitu memberikan bantuan kepada panti asuhan Kasih ABBA. Selain bantuan uang tunai, kami juga memberikan bantuan dalam bentuk sembako. Adapun sumbangan dalam bentuk sembako dan uang tunai, selain dari BPR tapi juga berasal dari donatur yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.					

Jakarta, 30 Januari 2024

PT BPR Tata Karya Indonesia

Lidianty Simbolon
Direktur

Feryanto Njoimin
Komisaris Utama